PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 14 TAHUN 2011

TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH TENGGARA

Meninbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 232 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Jalan Iskandar Muda Nomor : 02-04 Telp. (0629) 21029 - Fax (0629) 21029
Kutacane – Aceh Tenggara

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, (Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengeolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG SISTEM AKUNTANSI *PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.*

Pasal 1

Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Pasal 2

Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 3

Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara mengatur :

a. Penyelenggaraan akuntansi bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
b. Penyelenggaraan akuntansi bagi Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
c. Penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan konsolidasi/Gabungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 4

Sistem akuntansi ini mulai dilaksanakan pada Penyelenggaraan Akuntansi dan Penyusun Laporan Keuangan Tahun 2012.

Pasal 5

Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Aceh Tenggara ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal 12 Desember 2011
BUPATI ACEH TENGGARA

H. HASANUDDIN.B

Diundangkan di Kutacane
Pada tanggal 13 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH

DRS. HASANUNDDIN DARJO, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2011 NOMOR 14

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

A. PENDAHULUAN

Akuntansi keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara merupakan serangkaian proses mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Yang disebut keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sistem akuntansi keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara adalah sistem akuntansi untuk mencatat, menggolongkan, menganalisis, mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi-transaksi keuangan dalam rangka pelaksanaan APBK.

B. DASAR-DASAR DAN TEKNIS AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

B.1. Sistem Pembukuan

B.1.1. Pembukuan Tunggal (Single Entry)

Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat secara tunggal (tidak berpasangan). Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi Penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi Pengeluaran. Di Pemerintah Daerah selama hampir 3 dekade, pencatatan ini dipraktikkan, contohnya dalam Buku Kas Umum (BKU).

Pencatatan semacam itu disebut juga pembukuan. Sistem tata buku tersebut merupakan sebagian kecil dari akuntansi. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Akan tetapi, sistem ini juga memiliki kelemahan, antara lain kurang lengkap untuk pelaporan karena hanya dapat melaporkan saldo kas, dan tidak dapat melaporkan utang, piutang, dan ekuitas dana. Juga sulit untuk melakukan kontrol transaksi, akibatnya sulit menelusuri kesalahan pembukuan yang terjadi. Oleh karena itu, dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik dan dapat mengatasi kelemahan di atas. Sistem ini disebut sistem *double entry*. Sistem pencatatan *double entry* inilah yang sering disebut akuntansi.

B.1.2. Pembukuan Berpasangan (Double Entry)

Sistem pencatatan *double entry* juga sering disebut sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi akan dicatat secara berpasangan *(double= berpasangan, entry= pencatatan)*. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi Debit dan Kredit. Sisi Debit ada di sebelah kiri, sedangkan sisi Kredit ada di sebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset = kewajiban + ekuitas dana.

B.2. Siklus Akuntansi

Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah masukan (input) menjadi keluaran (output). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Output-nya adalah laporan keuangan. Di dalam proses akuntansi, terdapat beberapa catatan yang dibuat. Catatan-catatan tersebut adalah jurnal, buku besar, dan buku pembantu.

B.2.1 Persamaan Akuntansi

Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem pencatatan ini. Persamaan dasar akuntansi tersebut dalam konteks akuntansi pemerintahan dapat diuraikan dalam beberapa tahap sebagai berikut :

ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA

⇩

ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA + PENDAPATAN - BELANJA

⇩

ASET + BELANJA = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA + PENDAPATAN

⇩

ASET + BELANJA + PENGELUARAN PEMBIAYAAN = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA + PENDAPATAN + PENERIMAAN PEMBIAYAAN

PERSAMAAN AKUNTANSI UMUM	
DEBIT/ DR	**KREDIT/ KR**
ASET	KEWAJIBAN + EKUITAS DANA
ASET	KEWAJIBAN+EKUITAS DANA+ PENDAPATAN- BELANJA
ASET + BELANJA	KEWAJIBAN + EKUITAS DANA + PENDAPATAN
ASET + BELANJA + PENGELUARAN PEMBIAYAAN	KEWAJIBAN + EKUITAS DANA + PENDAPATAN + PENERIMAAN PEMBIAYAAN

B.2.2. Konsep Debit dan Kredit

Suatu transaksi yang berakibat bertambahnya aset akan dicatat pada sisi Debit, sedangkan yang berakibat berkurangnya aset akan dicatat pada sisi Kredit. Hal yang sama dilakukan untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan karena memiliki kesamaan sifat dengan aset dalam konsep debit/kreditnya.

Hal yang sebaliknya dilakukan untuk kewajiban, ekuitas dana, dan pendapatan. Apabila suatu transaksi mengakibatkan bertambahnya kewajiban, maka pencatatan akan dilakukan pada sisi Kredit, jika mengakibatkan berkurangnya kewajiban, pencatatan dilakukan pada sisi Debit. Hal serupa dilakukan untuk ekuitas dana, pendapatan, dan penerimaan pembiayaan karena memiliki kesamaan sifat dengan aset dalam konsep debit/kreditnya.

B.2.3. Penjurnalan

Sistem pencatatan yang digunakan pada akuntansi keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara adalah sistem akuntansi berpasangan *(double entry system)*. Dalam sistem ini, dikenal istilah penjurnalan. Menjurnal adalah prosedur mencatat transaksi keuangan di buku jurnal. Buku jurnal adalah media untuk mencatat transaksi secara kronologis (berdasarkan urutan waktu terjadi transaksi).

Jurnal dirancang sedemikian rupa sehingga menampung transaksi beserta keterangan-keterangan dan kondisi-kondisi yang menyertainya. Keberadaan jurnal dalam proses akuntansi tidak menggantikan peran rekening/akun (account) dalam mencatat transaksi, tetapi merupakan sumber untuk pencatatan ke dalam rekening/akun. Dengan adanya jurnal, pencatatan ke rekening/akun menjadi lebih mudah, sebab jurnal memilah-milah transaksi pendebitan dan pengkreditan yang sesuai dengan

rekening/akun yang bersangkutan. Penjurnalan harus menjaga keseimbangan persamaan akuntansi.

Berikut adalah format buku jurnal :

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
JURNAL ....
KODE SKPK :.....
NAMA SKPK :.....

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debet	Kredit

B.2.4. Buku Besar

Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan rekening/akun/perkiraan *(account)*. Rekening-rekening digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dengan demikian, rekening/akun merupakan kumpulan informasi dalam suatu sistem akuntansi. Untuk kelompok aktiva, misalnya dijumpai rekening/akun Kas untuk mencatat kas, rekening Piutang untuk mencatat piutang pajak, piutang retribusi, dan lain-lain, dan rekening Tanah untuk mencatat tanah. Dalam kelompok Utang akan dijumpai rekening seperti Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang pada Bank A, dan seterusnya. Dalam kelompok Ekuitas Dana akan dijumpai antara lain rekening Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

Transaksi ekonomi mula-mula dicatat menggunakan jurnal. Kemudian jurnal tersebut diposting ke rekening-rekening buku besar yang sesuai. Tindakan ini disebut posting. Posting ke buku besar sekaligus merupakan penggolongan dan peringkasan transaksi sebab tiap-tiap data transaksi dibawa ke tiap-tiap rekening/akun yang sesuai. Posting dapat dilakukan secara kronologis sebagaimana halnya penjurnalan, tetapi dapat juga secara periodik (mingguan atau bulanan).

Berikut adalah format buku besar :

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
BUKU BESAR

KODE SKPK :
NAMA SKPK :
KODE REKENING :
NAMA REKENING :

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit	Saldo

B.2.5. Saldo Normal

Seperti telah dijelaskan sebelumnya mengenai konsep Debit dan Kredit, sisi kiri atau Debit digunakan untuk mencatat kenaikan saldo rekening aktiva, belanja, dan pengeluaran pembiayaan. Sebaliknya sisi kanan atau Kredit digunakan untuk mencatat kenaikan rekening kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, dan penerimaan pembiayaan.

ASET **= saldo normal " Debit"**

Saldo normal rekening kelompok Aset bertambah di sisi Debit dan berkurang di sisi Kredit.

BELANJA **= Saldo Normal "Debit"**

Saldo normal rekening kelompok Belanja bertambah di sisi Debit dan berkurang di sisi Kredit.

PENGELUARAN PEMBIAYAAN **= Saldo Normal "Debit"**

Saldo normal rekening kelompok Pengeluaran Pembiayaan bertambah di sisi Debit dan berkurang di sisi Kredit.

KEWAJIBAN **= Saldo Normal "Kredit"**

Saldo normal rekening kelompok Kewajiban bertambah di sisi Kredit dan berkurang di sisi Debit.

EKUITAS DANA **= Saldo Normal "Kredit"**

Saldo normal rekening kelompok Ekuitas Dana bertambah di sisi Kredit dan berkurang di sisi Debit.

PENDAPATAN **= Saldo Normal "Kredit"**

Saldo normal rekening kelompok Pendapatan bertambah di sisi Kredit dan berkurang di sisi Debit.

PENERIMAAN PEMBIAYAAN **= Saldo Normal "Kredit"**

Saldo normal rekening akun Penerimaan Pembiayaan bertambah di sisi Kredit dan berkurang di sisi Debit .

B.2.6 Laporan Keuangan

Laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. SKPK menyusun laporan keuangan berupa Laporan realisasi Anggaran SKPK, Neraca SKPK, Catatan Atas Laporan Keuangan SKPK.

C. STRUKTUR AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

Struktur akuntansi di Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menggunakan konsep transaksi Kantor Pusat - Kantor Cabang *(Home Office - Branch Office Transaction atau disingkat menjadi HOBO).* Bertindak sebagai Kantor Pusat adalah PPKD dan yang bertindak sebagai Kantor Cabang adalah SKPK. Sebagai konsekuensi dari struktur akuntansi tersebut diperlukan kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPK melalui mekanisme akun resiprokal *(reciprocal account)* yaitu akun Rekening Koran-PPKD yang ada di SKPK dan akun Rekening Koran-SKPK yang ada di PPKD.

Akuntansi Rekening Koran-PPKD merupakan akuntansi ekuitas dana di tingkat SKPK. Akun "Rekening Koran-PPKD" setara dengan akun "Ekuitas Dana", tetapi penggunanya khusus SKPK. Hal ini dikarenakan SKPK merupakan cabang dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara (sebagai Pemda), sehingga SKPK tidak memiliki ekuitas dana sendiri, melainkan hanya menerima ekuitas dana dari Pemda, melalui mekanisme transfer. Akun "Rekening Koran-PPKD" akan bertambah bila SKPK menerima transfer aset (seperti menerima SP2D UP dan GU, menerima aset tetap dari Pemda), pelunasan pembayaran belanja LS (menerima SP2D LS), dan akan berkurang bila SKPK mentransfer aset ke Pemda (seperti penyetoran uang ke Pemda).

AKUNTANSI DI SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN

A. PENDAHULUAN

Struktur akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menggunakan struktur akuntansi Pusat - Cabang. Dalam hal ini akuntansi yang berlaku di SKPK adalah sebagai akuntansi cabang *(Branch Office)*. Konsekuensi dari akuntansi Pusat - Cabang ini adalah adanya akun resiprokal *(reciprocal account)* yaitu RK-PPKD (yang ada di SKPK) di kelompok ekuitas dana, dan RK-SKPK (yang ada di PPKD) di kelompok aset.

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sebagai entitas akuntansi wajib menyelenggaran dan menyusun laporan keuangan sendiri yang nantinya akan dikonsolidasi menjadi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam proses penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, akun resiprokal tersebut (RK SKPK dan RK PPKD) akan dieliminasi.

B. AKUNTANSI PENDAPATAN

Kelompok pendapatan yang diterima oleh PPKD adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Dana Perimbangan (pendapatan transfer)
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dari kelompok pendapatan di atas, Pendapatan Asli Daerah ada di SKPK, sedangkan dua kelompok pendapatan lainnya ada di PPKD. Rincian dari kelompok PAD terdiri dari:

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Lain-lain PAD yang Sah

B.1. Akuntansi Pendapatan SKPK

a. Transaksi pendapatan di SKPK dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan SKPK (PPK-SKPK). Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga.

b. Koreksi atas pengembalian pendapatan (yang tidak berulang), yang terjadi atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurang pendapatan; sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya, dicatat sebagai belanja tidak terduga.

c. pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan Pendapatan periode berjalan atau sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

d. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

B.2. Dokumen Sumber yang Digunakan

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi pendapatan di SKPK adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi, Surat tanda bukti pembayaran/ bukti penerimaan lainnya.

B.3. Standar Jurnal Transaksi Pendapatan

Berikut adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi penerimaan pendapatan di SKPK:

1. **Penerimaan pendapatan pajak daerah**

Standar Jurnal :

Dr. Kas di Bend. Penerimaan xx
Cr. Pendapatan Pajak Daerah xx

2. **Penerimaan pendapatan Retribusi daerah**

Standar Jurnal :

Dr. Kas di Bend. Penerimaan xx
Cr. Pendapatan Retribusi Daerah xx

3. **Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan**

Standar Jurnal :

Dr. Kas di Bend. Penerimaan xx
Cr. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.....xx

4. Penerimaan Lain-lain PAD yang sah

Standar Jurnal :

Dr. Kas di Bend. Penerimaan xx

Cr. Lain-lain PAD yang Sah xx

5. Penyetoran Pendapatan Ke Kas Daerah

Berikut adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi penyetoran pendapatan ke Kas Daerah:

Dr. RK-PPKD xx

Cr. Kas di Bend. Penerimaan xx

6. Pengembalian kelebihan pendapatan

Dalam kondisi tertentu, dimungkinkan terjadi pengembalian kelebihan pendapatan yang harus dikembalikan ke pihak ketiga. Jika pengembalian kelebihan pendapatan sifatnya berulang *(recurring)* baik yang terjadi di periode berjalan atau periode sebelumnya, dan juga berlaku bagi pengembalian yang sifatnya tidak berulang tetapi terjadi dalam periode berjalan, maka PPK-SKPK berdasarkan informasi transfer kas dari BUD mencatat transaksi pengembalian kelebihan tersebut dengan standar jurnal sebagai berikut:

Dr. Pendapatan xx

Cr. RK-PPKD xx

7. Pengembalian kelebihan Pendapatan SKPK yang dicatat oleh PPK-PPKD

Pada saat pengembalian kelebihan pendapatan tersebut dilakukan melalui Rekening Kas Daerah, Akuntansi PPKD akan mencatat transaksi pengembalian kelebihan pendapatan tersebut dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. RK-SKPK xx

Cr. Kas di Kas Daerah xx

8. Pengembalian kelebihan Pendapatan, bersifat tidak berulang *(non recurring)*

Jika pengembalian kelebihan pendapatan tersebut bersifat tidak berulang *(non-recurring)* dan terkait dengan pendapatan periode sebelumnya, SKPK tidak melakukan pencatatan. Pencatatan dilakukan oleh Akuntansi PPKD dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. SiLPA xx

Cr. Kas di Kas Daerah xx

C. AKUNTANSI BELANJA

C.1. Akuntansi Transaksi Belanja SKPK

a. Transaksi belanja di SKPK dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan SKPK (PPK-SKPK). Transaksi ini dicatat harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara pengeluaran atau pada saat menerima tembusan bukti transfer ke pihak ketiga.

b. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja, dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain.

c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

d. Untuk transaksi belanja modal, pencatatan dilakukan secara *corollary*, yaitu dicatat dengan 2 (dua) jurnal. Satu jurnal untuk mencatat belanja, dan yang lainnya untuk mencatat aset yang diperoleh dari transaksi belanja modal tersebut.

e. Transaksi belanja di SKPK dilakukan dengan dua (2) cara, yaitu:

- pembayarannya dengan SP2D UP/GU/TU
- pembayarannya dengan SP2D LS.

f. Transaksi Penerimaan Fihak Ketiga (PFK) merupakan transaksi transitoris berupa penerimaan kas dari pihak ketiga yang sifatnya titipan dan harus diakui sebagai utang.

C.2. Dokumen Sumber yang Digunakan

Dokumen sumber yang dijadikan dasar dalam pencatatan transaksi belanja ini adalah sebagai berikut:

No	Transaksi Belanja	Dokumen Sumber	Lampiran Dokumen Sumber
1	Belanja dengan mekanisme LS	-SP2D -Nota debit bank -bukti pengeluaran lainnya	-SPM -SPD -Berita Acara Serah Terima barang/ Jasa
2	Belanja dengan mekanisme UP/GU/TU	-Bukti pengesahan SPJ	-SPM -SPD -Bukti transaksi lainnya

3	Penerimaan PFK	-SP2D -Bukti potongan	-SPM
4	Pelunasan PFK	-Surat Setoran -Nota kredit -Bukti Potongan -Bukti pengeluaran lainnya	-SPM

C.3. Standar Jurnal Transaksi Belanja

Di bawah ini adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi belanja di SKPK:

1. Penerimaan SP2D UP/GU/TU oleh bendahara pengeluaran di SKPK

Standar Jurnal :

Dr. Kas di Bend. Pengeluaran xx
Cr. RK-PPKD xx

2. Pelaksanaan Belanja dengan menggunakan uang persediaan yang sebelumnya dicairkan melalui SP2D UP/GU/TU

Standar Jurnal :

Dr. Belanja xx
Cr. Kas di Bend. Pengeluaran xx

3. Pelaksanaan belanja dengan menggunakan SP2D LS

Standar Jurnal :

Dr. Belanja xx
Cr. RK-PPKD xx

4. Pengembalian sisa uang persediaan

Dalam hal terjadi pengembalian sisa uang persediaan dari SP2D UP/TU dari SKPK ke BUD, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Standar Jurnal :

Dr. RK-PPKD xx
Cr. Kas di Bend. Pengeluaran xx

5. Belanja modal disertai jurnal korolari

Khusus untuk transaksi belanja yang menghasilkan aset tetap, PPK-SKPK juga mengakui penambahan aset (sesuai dengan jenis asetnya) dengan menjurnal:

a. Belanja modal yang menggunakan uang persediaan

Standar Jurnal :

Dr. Belanja modal xx

Cr. Kas di Bend.. Pengeluaran xx

Dr. Aset tetap xx

Cr. EDI -Diinvestasikan dalam Aset tetap ... xx

b. Belanja modal dengan menggunakan SP2D LS

Standar Jurnal :

Dr. Belanja modal xx

Cr. RK PPKD..... xx

Dr. Aset tetap xx

Cr. EDI -Diinvestasikan dalam Aset tetap ... xx

Keterangan: Pengakuan aset pada butir No. 5 disesuaikan dengan kebijakan akuntansi tentang kapitalisasi aset yang merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/ setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap.

6. Pelaksanaan belanja dengan menggunakan SP2D Gaji dan Tunjangan

Dalam belanja LS Gaji dan Tunjangan, meskipun dana yang diterima oleh pegawai adalah jumlah netto (setelah dikurangi potongan), namun PPK-SKPK tetap mencatat belanja gaji dan tunjangan dalam jumlah bruto. PPK-SKPK tidak perlu mencatat potongan tersebut karena pencatatannya sudah dilakukan oleh BUD dalam subsistem Akuntansi PPKD.

Standar jurnal:

Dr. Belanja Gaji dan Tunjangan xx

Dr. Tunjangan Keluarga xx

Dr. Tunjangan Fungsional Umum xx

Cr. RK-PPKD xx

7. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja

Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dicatat sebagai pengurang belanja. PPK-SKPK mencatat transaksi pengembalian belanja tersebut dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas di Bend. Pengeluaran xx
Cr. Belanja xx

8. Pengembalian belanja atas transaksi belanja yang terjadi pada tahun sebelumnya

Pengembalian belanja atas transaksi belanja yang terjadi pada tahun sebelumnya, maka SKPK mencatat jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas di Bend. Pengeluaran xx
Cr. Pendapatan lain-lain xx

D. AKUNTANSI ASET SKPK

D.1. Prosedur Pencatatan Aset di SKPK

Prosedur pencatatan aset pada SKPK meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPK. Berdasarkan bukti transaksi yang ada, fungsi akuntansi SKPK membuat bukti memorial yang sedikitnya memuat informasi sebagai berikut:

(1) Tanggal Transaksi

(2) Jenis/nama aset

(3) Kode rekening terkait

(4) Klasifikasi aset tetap

(5) Nilai aset tetap

D.2. Standar Jurnal Akuntansi Aset

a. Standar Jurnal untuk Aset Tetap

1. Pengakuan aset tetap

Dr. Aset Tetap xx
Cr. EDI - Diinvestasikan dalam Aset Tetap xx

2. Pelepasan aset tetap

Dr. EDI - Diinvestasikan dalam Aset Tetap ... xx

Cr. Aset Tetap xx

b. Standar jurnal untuk Konstruksi dalam Pengerjaan

1. Pengakuan Konstruksi dalam Pengerjaan

Dr. Konstruksi dalam Pengerjaan xx

Cr. EDI - Diinvestasikan dalam Aset Tetap xx

2. Jika Konstruksi sudah selesai dilakukan

Pengakuan Aset Tetap yang sudah jadi :

Dr. EDI - Diinvestasikan dalam Aset Tetap xx

Cr. Konstruksi dalam Pengerjaan xx

Dr. Aset tetap xx

Cr. EDI - Diinvestasikan dalam Aset Tetap xx

3. Standar jurnal untuk Pemberian Hibah/Donasi dalam bentuk Aset Tetap

Dr. Aset Tetap xx

Cr. EDI - Diinvestasikan dalam Aset Tetap xx

4. Standar jurnal untuk aset lainnya

- Pengakuan

Dr. Aset Lainnya xx

Cr.EDI-Diinvestasikan dalam Aset Lainnya..... xx

- Pelepasan aset lainnya

Dr. EDI - Diinvestasikan dalam Aset Lainnya xx

Cr. Aset Lainnya xx

E. AKUNTANSI TRANSAKSI SELAIN KAS

Akuntansi Transaksi Selain Kas meliputi serangkaian proses, mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang meliputi transaksi: koreksi kesalahan dan penyesuaian; pengakuan aset tetap, utang jangka pendek dan ekuitas; depresiasi; hibah selain kas.

E.1. Koreksi Kesalahan dan Penyesuaian, Pengakuan Aset Tetap, Utang Jangka Pendek dan Ekuitas; Depresiasi; serta Hibah selain Kas

Koreksi kesalahan dan penyesuaian merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal yang telah diposting ke buku besar. Pengakuan Aset Tetap merupakan pengakuan terhadap perolehan aset yang dilakukan oleh SKPK. Pengakuan aset tetap dan ekuitas sangat terkait dengan belanja modal yang dilakukan oleh SKPK. Pengakuan Utang, dalam hal ini, pengakuan utang perhitungan pihak ketiga di SKPK sangat terkait dengan transaksi belanja yang mengharuskan pemotongan pajak atau potongan-potongan belanja lainnya. Namun jika utang yang dimaksud adalah utang jangka panjang, maka hal ini timbul dari transaksi pembiayaan penerimaan yang dilakukan oleh PPKD. Depresiasi dilakukan untuk menyusutkan nilai aset yang dimiliki oleh SKPK (apabila diperlukan). Hibah selain kas dalam hal ini adalah hibah dalam bentuk aset tetap.

E.2. Standar Jurnal Transaksi Selain Kas

Di bawah ini adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi selain kas di SKPK:

1. **Koreksi kesalahan pencatatan (contoh: seharusnya belanja ATK, salah dicatat ke belanja dokumen)**

   Standar Jurnal :

   Dr. Belanja ATK xx

   Cr. Belanja Dokumen xx

2. **Pengakuan Utang Titipan Fihak Ketiga**

   Standar Jurnal :

   Dr. Kas di Bend. Pengeluaran xx

   Cr. Utang PFK xx

F. AKUNTANSI TRANSAKSI PPKD-SKPK

F.1. Akuntansi Rekening Koran-PPKD (RK-PPKD)

Akuntansi Rekening Koran-PPKD merupakan akuntansi ekuitas dana di tingkat SKPK. Akun "RK-PPKD" setara dengan akun "Ekuitas Dana", tetapi penggunanya khusus SKPK. Hal ini dikarenakan SKPK dianggap merupakan cabang dari Pemda, sehingga sebenarnya SKPK tidak memiliki ekuitas dana sendiri, melainkan hanya menerima ekuitas dana dari Pemda, melalui mekanisme transfer. Akun "Rekening Koran-PPKD" akan bertambah bila SKPK menerima transfer aset (seperti menerima SP2D UP/GU dan menerima aset tetap dari Pemda), pelaksanaan belanja LS (menerima SP2D LS), dan akan berkurang bila SKPK mentransfer aset ke Pemda (seperti penyetoran uang ke Pemda).

F.2. Dokumen Sumber yang Digunakan

Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat mutasi akun RK-PPKD ini adalah dokumen yang terkait dengan transaksi antar kantor, antara SKPK dengan PPKD sebagai kantor pusat, yaitu dokumen transfer antara kedua kantor tersebut, yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Transaksi	Dokumen Sumber
1	SKPK menerima SP2D dari PPKD (transfer uang dari PPKD)	- SP2D UP - SP2D GU - SP2D TU
2	SKPK menerima tembusan pelunasan belanja LS dari PPKD (transfer belanja dari PPKD)	Tembusan SP2D LS
3	SKPK menerima atau menyerahkan barang (aset tetap) dari atau ke PPKD (transfer aset tetap)	- Berita acara serah terima barang
4	SKPK menyetorkan pendapatan ke PPKD (transfer uang ke PPKD)	STS
5	SKPK mengembalikan kas dari SP2D UP/TU	STS

F.3. Standar Jurnal Transaksi RK-PPKD

a. Standar jurnal untuk transaksi penerimaan SP2D dari BUD

Dr. Kas di Bend. Pengeluaran xx

Cr. RK-PPKD xx

b. Standar jurnal untuk transaksi penerimaan tembusan SP2D LS dari BUD

Dr. Belanja xx

Cr. RK-PPKD xx

c. SKPK menerima atau menyerahkan barang (aset tetap) dari atau ke PPKD (transfer aset tetap)

Standar jurnal SKPK menerima aset tetap dari PPKD:

Dr. Aset Tetap xx

Cr. RK-PPKD xx

Standar Jurnal SKPK menyerahkan aset tetap ke PPKD :

Dr. RK-PPKD xx

Cr. Aset Tetap xx

d. Standar jurnal untuk transaksi transfer aset lainnya dari/kepada SKPK

SKPK menerima aset lainnya dari PPKD :

Dr. Aset Lainnya xx

Cr. RK-PPKD xx

SKPK menyerahkan aset lainnya ke PPKD :

Dr. RK-PPKD xx

Cr. Aset Lainnya xx

e. Standar jurnal untuk transaksi penyetoran uang ke rekening Kas Daerah

Penyetoran hasil pendapatan oleh SKPK :

Dr. RK-PPKD xx

Cr. Kas di Bend. Penerimaan xx

f. Standar jurnal untuk transaksi pengembalian sisa uang persediaan dari SP2D UP/TU

Dr. RK-PPKD xx

Cr. Kas di Bend. Pengeluaran xx

AKUNTANSI DI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)

A. PENDAHULUAN

Struktur akuntansi untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menggunakan struktur akuntansi Pusat - Cabang. Dalam hal ini akuntansi yang berlaku di PPKD adalah sebagai akuntansi pusat *(Home Office)*. Konsekuensi dari akuntansi Pusat - Cabang ini adalah adanya akun resiprokal *(reciprocal account)* yaitu RK-PPKD (yang ada di satuan kerja) di kelompok ekuitas dana, dan RK-SKPK atau dapat juga disebut sebagai RK-SKPK (yang ada di PPKD) di kelompok aset. Terdapat enam jenis transaksi yang terjadi di PPKD yang terdiri dari akuntansi pendapatan, akuntansi belanja, akuntansi aset, akuntansi pembiayaan, akuntansi ekuitas dana, dan akuntansi selain kas.

B. AKUNTANSI PENDAPATAN

Kelompok pendapatan yang menjadi kewenangan PPKD adalah sebagai berikut:

- Dana Perimbangan (pendapatan transfer)
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

B.1. Akuntansi Pendapatan PPKD

a. Transaksi pendapatan di PPKD dicatat oleh Petugas Penatausahaan keuangan PPKD (Fungsi Akuntansi PPKD). Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh Kas Daerah atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga.

b. Koreksi atas pengembalian pendapatan (yang tidak berulang), yang terjadi atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya, dicatat sebagai belanja tidak terduga.

c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

d. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

B.2. Dokumen Sumber Yang Digunakan

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi pendapatan di PPKD ini adalah sebagai berikut:

Transaksi	Dokumen Sumber
Penerimaan dana perimbangan	- *Surat tanda bukti transfer pembayaran* dari KPPN (Nota Kredit Bank) - Bukti penerimaan lainnya
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	- Surat tanda bukti penerimaan - Bukti penerimaan lainnya (Berita acara penerimaan)

B.3. Standar Jurnal Transaksi Pendapatan

Berikut adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi pendapatan di PPKD:

1. Penerimaan pendapatan Dana perimbangan

   Dr. Kas di Kasda xx

   Cr. Pendapatan dana perimbangan xx

2. Penerimaan pendapatan Lain-lain yang Sah

   Dr. Kas di Kasda xx

   Cr. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah..... xx

C. AKUNTANSI BELANJA

C.2. Akuntansi Transaksi Belanja PPKD

a. Transaksi belanja di PPKD dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan PPKD (Fungsi akuntansi PPKD). Transaksi ini dicatat harian pada saat kas dibayarkan bendahara pengeluaran atau pada saat menerima tembusan bukti transfer ke pihak ketiga.

b. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja, dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain.

c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

d. Untuk transaksi belanja modal, pencatatan dilakukan secara *corollary*, yaitu dicatat dengan 2 (dua) jurnal. Satu jurnal untuk mencatat belanja, dan yang lainnya untuk mencatat aset yang diperoleh dari transaksi belanja modal tersebut.

e. Transaksi belanja di PPKD dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- pembayarannya dengan SP2D UP/GU/TU
- pembayarannya dengan SP2D LS

f. Transaksi Penerimaan Fihak Ketiga (PFK) merupakan transaksi transitoris berupa penerimaan kas dari pihak ketiga yang sifatnya titipan dan harus diakui sebagai utang.

C.3. Dokumen Sumber yang Digunakan

Dokumen sumber yang dijadikan dasar dalam pencatatan transaksi belanja ini adalah sebagai berikut:

No	Transaksi	Dokumen Belanja	Lampiran Dokumen Sumber
1	Belanja Bunga	- SP2D LS	- SPM - nota debit bank - SPD - bukti pengeluaran lainnya
2	Belanja Subsidi	- SP2D LS	- SPM - nota debit bank - SPD - bukti pengeluaran lainnya - keputusan kepala daerah
3	Belanja Hibah	- SP2D LS	- SPM - nota debit bank - SPD - bukti pengeluaran lainnya - keputusan kepala daerah

4	Belanja Bantuan Sosial	- SP2D LS	- SPM - Bukti pengeluaran lainnya - SPD - Berita acara - Keputusan kepala daerah - SP2D LS
5	Belanja Bagi Hasil	- SP2D LS	- SPM - Bukti pengeluaran lainnya - SPD - Berita acara - Keputusan kepala daerah
6	Belanja Bantuan Keuangan	- SP2D LS	- SPM - Bukti pengeluaran lainnya - SPD - Berita acara - Keputusan kepala daerah
7	Belanja Tidak Tertuga	- SP2D LS	- SPM - Bukti pengeluaran lainnya - SPD - Keputusan kepala daerah

C.4. Standar Jurnal Transaksi Belanja

Di bawah ini adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi belanja di PPKD:

1. Belanja bunga

   Standar jurnal :

   Dr. Belanja bunga xx

   Cr. Kas di Kasda xx

2. Belanja subsidi

Standar jurnal :

Dr. Belanja subsidi xx

Cr. Kas di Kasda xx

3. Belanja hibah

Standar jurnal :

Dr. Belanja hibah xx

Cr. Kas di Kasda xx

4. Belanja bantuan sosial

Standar jurnal :

Dr. Belanja bantuan sosial xx

Cr. Kas di Kasda xx

5. Belanja bagi hasil

Standar jurnal :

Dr. Belanja bagi hasil xx

Cr. Kas di Kasda xx

6. Belanja bantuan keuangan

Standar jurnal :

Dr. Belanja bantuan keuangan ... xx

Cr. Kas di Kasda xx

7. Belanja tidak terduga

Standar jurnal :

Dr. Belanja tidak terduga xx

Cr. Kas di Kasda xx

8. Dalam LS Gaji dan Tunjangan, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat potongan pajak/Taperum/IWP untuk seluruh SKPK yang pemotongannya dilakukan oleh PPKD.

Standar jurnal :

Dr. Kas di Kasda xx

Cr. Utang Pajak PFK xx

Cr. Utang Taperum PFK xx

Cr. Utang IWP PFK xx

9. Dalam LS Barang dan Jasa, seringkali terdapat potongan pajak sehingga dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah neto (setelah dikurangi potongan pajak), namun Fungsi Akuntansi PPKD tetap mencatat belanja tersebut dalam jumlah bruto. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat potongan tersebut sebagai Utang.

   Standar jurnal :

   Dr. Kas di Kasda xx

   Cr. Utang Pajak xx

   Pada saat Penyetoran Standar Jurnalnya :

   Dr. Utang Pajak xx

   Cr. Kas di Kasda xx

D. AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Transaksi pembiayaan terbagi atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih dari kedua transaksi tersebut merupakan pembiayaan neto. Transaksi penerimaan pembiayaan berasal dari:

- penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya
- pencairan dana cadangan
- hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- penerimaan pinjaman daerah
- penerimaan kembali pemberian pinjaman
- penerimaan piutang daerah.

Transaksi pengeluaran pembiayaan berasal dari:

- pembentukan dana cadangan
- penyertaan modal pemerintah daerah

- pembayaran pokok pinjaman (utang)
- pemberian pinjaman daerah.

Transaksi pembiayaan merupakan transaksi yang terjadi di PPKD sebagai Pemda. Hal ini dikarenakan sifat atau tujuan dari dilakukannya transaksi ini, yaitu untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran daerah. Selain itu dalam transaksi pembiayaan, di dalamnya akan melibatkan akun-akun ekuitas dana yang hanya terdapat di dalam neraca Pemda. Oleh karena itu transaksi ini dicatat dan dilaporkan dalam LRA PPKD sebagai Pemda (kantor pusat), yang kemudian akan digabungkan dengan LRA SKPK , menjadi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

D.1. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

- Transaksi penerimaan pembiayaan dicatat dengan menggunakan asas bruto, yaitu penerimaan pembiayaan dicatat sebesar nilai brutonya (tidak dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pembiayaan penerimaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas daerah.

D.1.2. Standar Jurnal Transaksi Penerimaan Pembiayaan

Penjurnalan transaksi penerimaan pembiayaan dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD, secara harian berdasarkan urutan kronologis. Jurnal untuk transaksi penerimaan pembiayaan merupakan jurnal *corollary*, di mana satu jurnal akan berpengaruh terhadap Laporan Realisasi Anggaran, dan jurnal lainnya akan mempengaruhi Neraca.

Standar jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan SiLPA

   Tidak Di jurnal

2. Pencairan dana cadangan

   Standar jurnal :

   Dr. Kas di Kasda xx
   Cr. Penerimaan pembiayaan - DanaCadangan xx
   Dr. EDC-Diinvestasikan dalam dana cadangan..... xx
   Cr. Dana cadangan xx

3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Standar jurnal :

Dr. Kas di Kasda xx

Cr. Penerimaan pembiayaan–Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan xx

Dr. EDI - Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang ...xx

Cr. Penyertaan modal pemerintah daerah/

Investasi xx

4. Penerimaan Pinjaman Daerah (misal, utang dalam negeri)

Standar jurnal :

Dr. Kas di Kasda xx

Cr. Penerimaan pembiayaan - Penerimaan pinjaman daerah xx

Dr. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang xx

Cr. Utang Dalam Negeri xx

5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Standar jurnal :

Dr. Kas di Kasda xx

Cr. Penerimaan pembiayaan - Penerimaan kembali pemberian pinjaman xx

Dr. Ekuitas dana lancar - Cadangan piutang ... xx

Cr. Bagian lancar pinjaman xx

6. Penerimaan piutang daerah

Standar Jurnal :

Dr. Kas di Kasda xx

Cr. Penerimaan pembiayaan - Penerimaan piutang daerah xx

Dr. Ekuitas dana lancar-Cadangan piutang xx

Cr. Piutang xx

D.2. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

D.1.2. Standar Jurnal Transaksi Pengeluaran Pembiayaan

Penjurnalan transaksi pengeluaran pembiayaan dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD, secara harian berdasarkan urutan kronologis. Jurnal untuk transaksi pengeluaran pembiayaan merupakan jurnal *corollary*, di mana satu jurnal akan berpengaruh terhadap Laporan Realisasi Anggaran, dan jurnal lainnya akan mempengaruhi Neraca.

Standar jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengisian Dana Cadangan

   Standar jurnal :

   Dr. Pengeluaran pembiayaan-
   Pengisian Dana Cadangan xx
   Cr. Kas di Kasda xx
   Dr. Dana cadangan xx
   Cr. Ekuitas dana cadangan-Diinvestasikan dalam dana cadangan xx

2. Penyertaan modal pemerintah daerah

   Standar jurnal :

   Dr. Pengeluaran pembiayaan-Penyertaan Modal daerah..... . xx
   Cr. Kas di Kasda xx
   Dr. Penyertaan modal pemerintah daerah xx
   Cr. Ekuitas dana investasi-
   Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang.. xx

3. Pembayaran pokok pinjaman (misal, pembayaran utang dalam negeri)

   Standar jurnal :

   Dr.Pengeluaran pembiayaan–
   Pembayaran pokok pinjaman xx
   Cr. Kas di Kasda xx
   Dr. Bagian lancar utang jangka panjang dalam Negeri ...xx
   Cr. Dana yang harus disediakan untuk
   Pembayaran utang jangka pendek xx

4. Pemberian pinjaman daerah (misal, kepada Perusahaan Daerah)

Standar jurnal :

Dr. Pengeluaran pembiayaan – Pemberian Pinjaman xx

Cr. Kas di Kasda xx

Dr. Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xx

Cr. Ekuitas dana lancar-Cadangan piutang xx

E. AKUNTANSI ASET

E.1. Prosedur Pencatatan Aset di PPKD

Prosedur pencatatan aset pada akuntansi PPKD lebih merupakan pencatatan atas pengakuan aset yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh Pemda, misalnya pengakuan atas investasi jangka panjang atau dana cadangan. Berdasarkan bukti transaksi yang ada, fungsi akuntansi PPKD membuat bukti memorial yang sedikitnya memuat informasi sebagai berikut:

(1) Jenis/nama aset

(2) Kode rekening terkait

(3) Nilai aset

(4) Tanggal Transaksi

E.2. Standar Jurnal Akuntansi Aset

Standar Jurnal untuk investasi :

- Pengakuan investasi

Dr. Investasi xx

Cr. EDI - Diinvestasikan dalam Investasi xx

- Pelepasan investasi

Dr. EDI - Diinvestasikan dalam Investasi xx

Cr. Investasi xx

F. AKUNTANSI EKUITAS DANA

Ekuitas dana terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Ekuitas dana lancar, terdiri atas:
   - Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)
   - Cadangan piutang
   - Cadangan persediaan
   - Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek
2. Ekuitas dana investasi, terdiri atas:
   - Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang
   - Diinvestasikan dalam aset tetap
   - Diinvestasikan dalam aset lainnya
   - Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang
3. Ekuitas dana cadangan, terdiri atas:
   - Diinvestasikan dalam dana cadangan

Dari keseluruhan akun yang termasuk ke dalam ekuitas dana tersebut, dua diantaranya merupakan contra account, yaitu:

- dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.
- dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang.

Dikarenakan kedua akun tersebut merupakan contra account dari ekuitas dana, maka saldo normalnya berlawanan dengan saldo normal ekuitas dana. Saldo normal ekuitas dana adalah kredit (Cr), sedangkan kedua akun tersebut bersaldo normal debit (Dr).

F.1. Akuntansi Ekuitas Dana (di PPKD sebagai PPKD/BUD)

Akuntansi atas ekuitas dana terjadi bersamaan dengan akuntansi atas transaksi belanja modal, penjualan aset tetap dan pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran), serta penyesuaian (khususnya piutang, persediaan dan depresiasi), karena sebenarnya perubahan yang terjadi pada saldo ekuitas dana, disebabkan oleh transaksi-transaksi tersebut serta

penyesuaian di akhir periode akuntansi. Pencatatan (penjurnalan) atas akun ekuitas dana adalah sebagai jurnal *corollary* dari transaksi-transaksi tersebut.

F.1.1. Pelaksana Akuntansi Ekuitas Dana

Akuntansi atas ekuitas dana dilaksanakan oleh fungsi akuntansi di PPKD sebagai PPKD/BUD (kantor pusat).

F.1.2. Standar Jurnal Transaksi Ekuitas Dana

Penjurnalan atas ekuitas dana dilaksanakan secara harian dan kronologis, serta bersamaan dengan penjurnalan transaksi pembiayaan, penjualan aset daerah, dan penyesuaian (di tingkat Pemda/PPKD/BUD). Di tingkat SKPK penjurnalan menggunakan akun Rekening Pemda, untuk mencatat *corollary* dari belanja modal dan penyesuaian (persediaan, piutang, dan depresiasi).

a. Standar jurnal untuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Tidak dijurnal

b. Standar jurnal untuk cadangan piutang

Standar jurnal Dari penyesuaian atas timbulnya piutang pendapatan di akhir periode akuntansi :

Dr. Piutang xx
Cr. Ekuitas dana lancar-Cadangan piutang.. . xx

Standar jurnal dari transaksi pembiayaan:

- Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- Penerimaan piutang daerah

Dr. Ekuitas dana lancar-Cadangan piutang xx
Cr. Piutang xx

c. Standar jurnal untuk cadangan persediaan

Standar jurnal dari penyesuaian atas inventarisasi fisik persediaan

Dr. Persediaan xx

Cr. Ekuitas dana lancar-Cadangan persediaan.. xx

d. Standar jurnal untuk dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang jangka pendek

Standar jurnal dari transaksi pembiayaan penerimaan:

- Penerimaan pinjaman daerah jangka pendek

Dr. Ekuitas dana lancar-Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek xx

Cr.Utang..... xx

Standar jurnal dari transaksi pengeluaran pembiayaan:

- Pembayaran pokok pinjaman

Dr. Bagian lancar utang xx

Cr. Ekuitas dana lancar-Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek xx

e. Standar jurnal untuk diinvestasikan dalam investasi jangka panjang

Dari transaksi pembiayaan penerimaan:

- Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan

Dr. EDI - Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang xx

Cr. Penyertaan modal pemerintah daerah/investasi jangka panjang xx

Standar jurnal dari transaksi pengeluaran pembiayaan:

- Penyertaan modal pemerintah daerah

Dr. Penyertaan modal pemerintahdaerah xx

Cr. EDI - Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang xx

f. Standar jurnal untuk dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang

Dari transaksi penerimaan pembiayaan:

- Penerimaan pinjaman daerah jangka panjang

Dr. Ekuitas dana - Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang xx

Cr. Utang jangka panjang xx

Dari transaksi pengeluaran pembiayaan:

- Pembayaran pokok pinjaman

Dr. Bagian lancar utang xx

Cr. Ekuitas dana lancar - Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran utang jangka pendek xx

Catatan: jurnal pembayaran pokok pinjaman, menggunakan akun dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek, karena utang yang dibayar adalah bagian yang jatuh temponya saja, yaitu yang sudah menjadi utang jangka pendek.

g. Standar jurnal untuk diinvestasikan dalam dana cadangan

Dari transaksi pengeluaran pembiayaan:

- Pembentukan dana cadangan

Dr. Dana cadangan xx

Cr. Ekuitas dana cadangan -

Diinvestasikan dalam dana

Cadangan..... xx

Dari transaksi penerimaan pembiayaan:

- Pencairan dana cadangan

Dr. Ekuitas dana investasi - Diinvestasikan

dalam dana cadangan xx

Cr. Dana cadangan xx

G. Akuntansi Rekening PPKD (di SKPK) dan Rekening SKPK (di PPKD/BUD)

Akuntansi Rekening Koran-PPKD merupakan akuntansi ekuitas dana di tingkat SKPK. Akun "Rekening Koran-PPKD" setara dengan akun "Ekuitas Dana", tetapi penggunanya khusus SKPK. Hal ini dikarenakan SKPK merupakan cabang dari Pemda, sehingga sebenarnya SKPK tidak memiliki ekuitas dana sendiri, melainkan hanya menerima ekuitas dana dari Pemda, melalui mekanisme transfer. Akun "Rekening Koran-PPKD" akan bertambah bila SKPK menerima transfer aset (seperti menerima SP2D UP dan GU, menerima aset tetap dari Pemda), mendapatkan aset melalui belanja modal atau pelunasan pembayaran belanja LS (menerima SP2D LS), dan akan berkurang bila SKPK mentransfer aset ke Pemda (seperti penyetoran uang ke Pemda).

G.1. Pelaksana Akuntansi Rekening SKPK

Pelaksana akuntansi Rekening Koran-SKPK adalah fungsi akuntansi di PPKD, yang akan mencatat dan melaporkan transaksi antara SKPK yang bersangkutan dengan PPKD sebagai PPKD/BUD (transaksi antar kantor).

G.1.1. Standar Jurnal Transaksi Rekening SKPK

a. Standar jurnal untuk transaksi pengeluaran SP2D dari BUD/PPKD

- PPKD mengeluarkan SP2D UP/GU/TU

Dr. Rekening Koran-SKPK xx

Cr. Kas di Kasda xx

b. Standar jurnal untuk transaksi penerimaan tembusan SP2D - LS dari BUD/PPKD

- PPKD mengeluarkan tembusan SP2D LS (transfer belanja)

Dr. Rekening Koran-SKPK xx

Cr. Kas di Kasda xx

c. Standar jurnal untuk transaksi penyetoran uang ke rekening Kas Daerah

- Penyetoran uang hasil pendapatan oleh SKPK

Dr. Kas di Kasda xx

Cr. Rekening Koran-SKPK xx

d. Standar jurnal untuk penyesuaian yang dilakukan PPKD

- Penyesuaian atas persediaan

Dr. Persediaan xx

Cr. EDL - Persediaan xx

Penyesuaian atas pengakuan piutang pendapatan

Dr. Piutang xx

Cr. EDL - Piutang xx

H. AKUNTANSI TRANSAKSI SELAIN KAS

Akuntansi Transaksi selain Kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang meliputi transaksi koreksi kesalahan dan penyesuaian, pengakuan aset tetap, utang jangka panjang, dan ekuitas; depresiasi; dan hibah selain kas.

H.1. Koreksi Kesalahan dan Penyesuaian, Pengakuan Aset Tetap, Utang Jangka Panjang, dan Ekuitas; Depresiasi; serta Hibah selain Kas

Koreksi kesalahan pencatatan dan penyesuaian merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar. Pengakuan Aset Tetap merupakan pengakuan terhadap perolehan aset yang dilakukan oleh PPKD. Pengakuan aset tetap dan ekuitas sangat terkait dengan belanja modal yang dilakukan oleh PPKD. Pengakuan utang jangka panjang timbul dari transaksi pembiayaan penerimaan yang dilakukan oleh PPKD. Depresiasi dilakukan untuk menyusutkan nilai aset yang dimiliki oleh PPKD.

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT KABUPATEN ACEH TENGGARA

A. PENDAHULUAN

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara merupakan *output* akhir dari proses akuntansi yang dilaksanakan di tingkat SKPK dan di tingkat PPKD. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

B. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN PEMDA

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara merupakan laporan keuangan gabungan dari seluruh SKPK dan laporan keuangan PPKD sebagai PPKD/BUD. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dapat dibuat setiap semester dan akhir tahun dimana merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran tersebut.

Untuk bisa menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, terlebih dahulu disusun laporan keuangan SKPK secara terpisah, juga PPKD menyusun laporan keuangan sebagai PPKD/BUD. Pada saat akan disusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara maka laporan keuangan SKPK dan PPKD digabungkan untuk menjadi laporan keuangan tingkat Pemda. Format laporan keuangan PPKD sama dengan laporan keuangan SKPK. Yang berbeda dari kedua laporan keuangan tersebut adalah cakupan transaksi dan akun yang digunakannya.

Adapun komponen laporan keuangan yang disusun oleh PPKD terdiri atas:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b) Neraca;

c) Laporan Arus Kas; dan

d) Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen laporan keuangan di tingkat SKPK terdiri atas:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b) Neraca; dan

c) Catatan atas Laporan Keuangan.

C. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN GABUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

Laporan keuangan gabungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara disusun setiap semester, dan nilainya merupakan gabungan dari seluruh SKPK dan PPKD sebagai PPKD/BUD. Laporan ini dibuat oleh PPKD sebagai Pemda. Dalam penyusunan laporan keuangan gabungan, rekening-rekening yang sifatnya resiprokal (timbal balik antar unit dalam satu Pemda) harus dihilangkan terlebih dahulu. Mekanisme penghilangan akun resiprokal tersebut, yaitu melalui proses eliminasi akun-akun resiprokal. Akun-akun resiprokal yang terjadi dalam sistem akuntansi keuangan daerah ini adalah akun RK-SKPK dan akun RK-PPKD. Akun RK-SKPK dicatat oleh PPKD, sedangkan akun RK-PPKD dicatat oleh SKPK. Kedua akun tersebut digunakan untuk menggambarkan transaksi yang dilakukan antar unit tersebut, dan akan berpengaruh terhadap neraca kedua unit tersebut. Hal ini terjadi karena hubungan PPKD dan PPKD adalah hubungan Pusat - Cabang, dengan PPKD bertindak sebagai kantor pusat, dan PPKD bertindak sebagai kantor cabang, tetapi keduanya adalah satu entitas pelaporan, yaitu entitas pelaporan Pemda yang bersangkutan.

C.1. Penyusunan *Worksheet* Laporan Keuangan Gabungan

C.1.1. *Worksheet* untuk Laporan Realisasi Anggaran Gabungan

Untuk laporan realisasi anggaran (LRA) gabungan tidak memerlukan proses eliminasi, tetapi penggabungan langsung seluruh pendapatan dan belanja dari PPKD dan semua PPKD. Berikut adalah contoh *worksheet* untuk Laporan Realisasi Anggaran Gabungan:

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
WORKSHEET LAPORAN REALISASI ANGGARAN GABUNGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

(dalam rupiah)

NO URUT	URAIAN	SKPK	PPKD	GABUNGAN
1	2	3	4	5=3+4
1	**PENDAPATAN**			
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**			
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah			
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah			
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**			
1.2.1	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)			
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum			
1.2.1.4	Dana Alokasi khusus			
1.2.2	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA**			
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus			
1.2.2.2	Dana Penyesuaian			
1.2.3	**TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI**			
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya			
1.3	***LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH***			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat			
1.3.3	Pendapatan Lainnya			
2	**BELANJA**			
2.1	**BELANJA OPERASI**			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Barang			
2.2	**BELANJA MODAL**			

2.2.1	Belanja Tanah			
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin			
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan			
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya			
2.2.6	Belanja Aset Lainnya			
2.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**			
2.3.1	Belanja Tidak Terduga			
2.4	**TRANSFER**			
2.4.1	**TRANSFER/ BAGI HASIL KE DESA**			
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak			
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi			
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya			
	SURPLUS/ (DEFISIT)			
3	**PEMBIAYAAN**			
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**			
3.1.1	Penggunaan SILPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
3.1.4	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat			
3.1.5	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya			
3.1.6	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank			
3.1.7	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank			
3.1.8	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi			
3.1.9	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya			
3.1.10	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara			
3.1.11	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah			
3.1.12	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya			
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat			

3.2.4	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya			
3.2.5	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank			
3.2.6	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank			
3.2.7	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi			
3.2.8	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya			
3.2.9	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara			
3.2.10	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah			
3.2.11	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya			
3.3	**PEMBIAYAAN NETTO**			
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)			

C.1.2. Worksheet untuk Neraca Gabungan

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

WORKSHEET NERACA GABUNGAN

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SKPK	PPKD	ELIMINASI	GABUNGAN
1	**ASET**				
2	**ASET LANCAR**				
3	Kas di Kas Daerah				
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran				
5	Kas Di Bendahara Penerimaan				
6	Investasi Jangka Pendek				
7	Piutang Pajak				
8	Piutang Retribusi				
9	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara				
10	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah				
11	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat				
12	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
13	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran				
14	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan				
15	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi				
16	Piutang Lainnya				
17	Persediaan				
18	*Jumlah Aset Lancar*				
19					
20	**INVESTASI JANGKA PANJANG**				
21	INVESTASI NON PERMANEN				
22	Pinjaman Jangka Panjang				
23	Investasi Dalam Surat Utang Negara				
24	Investasi Dalam Proyek Pembangunan				
25	Investasi Non Permanen Lainnya				
26	INVESTASI PERMANEN				
27	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
28	Investasi Permanen Lainnya				
29	*Jumlah Investasi Jangka Panjang*				
30					
31	**ASET TETAP**				
32	Tanah				
33	Peralatan dan Mesin				
34	Gedung dan Bangunan				
35	Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
36	Aset Tetap Lainnya				
37	Konstruksi Dalam Pengerjaan				
38	Akumulasi Penyusutan				
39	*Jumlah Aset Tetap*				
40					
41	**DANA CADANGAN**				
42	Dana Cadangan				
43	*Jumlah Dana Cadangan*				
44					
45	**ASET LAINNYA**				
46	Tagihan Penjualan Angsuran				
47	Tuntutan Ganti Rugi				

48	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga				
49	Aset Tak Berwujud				
50	Aset Lain-lain				
51	*Jumlah Aset Lainnya*				
52					
53	**ASET UNTUK DIKONSOLIDASI**				
54	RK SKPK....				
55	*Jumlah Aset Untuk Dikonsolidasi*				
56					
57	**JUMLAH ASET**				
58					
59	**KEWAJIBAN**				
60	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**				
61	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				
62	Utang Bunga				
63	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				
64	Pendapatan Diterima Di Muka				
65	Utang Jangka Pendek Lainnya				
66	*Jumlah Kewajiban Jangka Pendek*				
67					
68	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**				
69	Utang Dalam Negeri - Pemerintah				
70	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan				
71	Utang Dalam Negeri - Obligasi				
72	Utang Jangka Panjang Lainnya				
73	*Jumlah Kewajiban Jangka Panjang*				
74					
75	**EKIUTAS**				
76	EKUITAS DANA LANCAR				
77	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)				
78	Cadangan Piutang				
79	Cadangan Persediaan				
80	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek				
81	*Jumlah Ekuitas Dana Lancar*				
82					
83	EKUITAS DANA INVESTASI				
84	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang				
85	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap				
86	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya				
87	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang				
88	*Jumlah Ekuitas Dana Investasi*				
89					
90	EKUITAS DANA CADANGAN				
91	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan				
92	*Jumlah Ekuitas Dana Cadangan*				
93					
94	EKUITAS DANA UNTUK DIKONSOLIDASI				
95	RK PPKD				
96	*Jumlah Ekuitas Untuk Dikonsolidasi*				
97					
98	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS**				

C.2. Jurnal Eliminasi

Proses eliminasi dilakukan pada saat membuat *worksheet* neraca gabungan Pemda. Jurnal eliminasi yang harus dibuat oleh PPKD sebagai Pemda adalah sebagai berikut:

Jurnal eliminasi rekening dinas dan rekening pemda (nilainya akumulasi dari seluruh PPKD)

Dr. Rekening Koran-PKPD xx

Cr. Rekening Koran-SKPK xx